

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 - e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 - t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
 - ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
 - ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
 - gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
 - 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
 - 2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
- BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
 - 3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
 - c. Transfer
 - d. Pembiayaan
 - 3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
 - 3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - a. Pendapatan Laporan Operasional
 - b. Beban
 - c. Kegiatan Non Operasional
 - d. Pos-pos Luar Biasa
 - e. Surplus (Defisit) LO
 - 3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 3.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 3.6 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
- BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN
- BAB V PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 sebagai berikut.

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan SKPD yang tidak mempunyai tupoksi sebagai SKPD penghasil, sehingga tidak ada pendapatan yang diperoleh oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bisa menambah PAD.

b. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	12.107.876.223,-	11.949.542.161,-	98,69	158.334.062,-
2	Belanja Modal	360.766.055,-	355.469.150,-	98,53	5.296.905,-
	Jumlah Belanja	12.468.642.278,-	12.305.011.311,-	98,69	163.630.967,-

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 – 2021

Belanja	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Pegawai	1.195.249.001,00	3.968.511.990,00	4.814.275.476,00	4.774.624.413,00	4.065.221.027
Belanja Barang	3.750.361.223,00	7.155.935.037,00	9.273.695.796,00	7.585.052.670,00	7.884.321.134
Belanja Modal	588.051.000,00	168.922.500,00	2.096.736.815,00	130.988.000,00	355.469.150
Jumlah	5.533.661.224,00	11.293.369.527,00	16.184.708.087,00	12.490.665.083,00	12.305.011.311
% Kenaikan	7,85	104,08	43,31	-22,82	

2017 < 2018 adanya anggaran Pilpres dan Pileg, penambahan 50 orang Tenaga Kerja Bulanan, Hr Tim Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum dan Pembangunan 3 Kamar Mandi

2018 < 2019 adanya kenaikan anggaran TPP, pembelian 1 unit mobil damkar, pembangunan Mushola dan tempat parkir

2019 > 2020 adanya pengurangan anggaran karena Covid 19

2020 > 2021 adanya pengurangan anggaran karena Selfbloking

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Belanja Langsung			
Program 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	3.280.500,00	3.280.500,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	3.280.500,00	3.280.500,00	
Kegiatan 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	3.366.000,00	3.366.000,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	3.366.000,00	3.366.000,00	
Kegiatan 3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	4.039.627.561,00	4.017.990.535,00	
- Belanja Barang & Jasa	-	-	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	4.039.627.561,00	4.017.990.535,00	
Kegiatan 4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	32.806.492,00	32.806.492,00	
- Belanja Barang & Jasa	21.024.000,00	21.024.000,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	53.830.492,00	53.830.492,00	
Kegiatan 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	2.232.000,00	2.232.000,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	2.232.000,00	2.232.000,00	
Kegiatan 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	7.875.000,00	7.874.000,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	7.875.000,00	7.875.000,00	
Kegiatan 7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	280.324.000,00	180.699.310,00	

- Belanja Modal	-	-	
Jumlah Kegiatan 3	280.324.000,00	180.699.310,00	
Kegiatan 8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	2.980.000,00	2.980.000,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	2.980.000,00	2.980.000,00	
Kegiatan 9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	16.070.890,00	16.070.890,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	16.070.890,00	16.070.890,00	
Kegiatan 10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	141.298.050,00	141.015.570,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	141.298.050,00	141.015.570,00	
Kegiatan 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	54.171.260,00	54.170.600,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	54.171.260,00	54.170.600,00	
Kegiatan 12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	3.600.000,00	3.600.000,00	
Kegiatan 13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	46.769.000,00	46.716.245,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	46.769.000,00	46.716.245,00	
Kegiatan 14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	13.356.000,00	13.356.000,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	13.356.000,00	13.356.000,00	
Kegiatan 15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	66.562.080,00	65.071.458,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	66.562.080,00	65.071.458,00	
Kegiatan 16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	395.970.000,00	394.668.550,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	395.970.000,00	394.668.550,00	
Kegiatan 17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	516.325.500,00	516.320.161,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	516.325.500,00	516.320.161,00	
Kegiatan 18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	25.800.000,00	25.800.000,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	25.800.000,00	25.800.000,00	
Kegiatan 19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	27.600.530,00	27.476.500,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	27.600.530,00	27.476.500,00	
Kegiatan 1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Kegiatan 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	340.425.000,00	340.358.000,00	
- Belanja Modal	-	-	
Jumlah	340.425.000,00	340.358.000,00	
Kegiatan 2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	-	-	
- Belanja Barang & Jasa	1.935.950.000,00	1.911.444.000,00	
- Belanja Modal	-	-	

Jumlah		1.935.950.000,00	1.911.444.000,00	
Kegiatan 3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai		-	-	
- Belanja Barang & Jasa		288.021.250,00	287.588.000,00	
- Belanja Modal		-	-	
Jumlah		288.021.250,00	287.588.000,00	
Kegiatan 3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai		-	-	
- Belanja Barang & Jasa		21.862.500,00	21.600.500,00	
- Belanja Modal		-	-	
Jumlah		21.862.500,00	21.600.500,00	
Kegiatan 4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai		-	-	
- Belanja Barang & Jasa		14.645.000,00	14.645.000,00	
- Belanja Modal		-	-	
Jumlah		14.645.000,00	14.645.000,00	
Kegiatan 5	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai		6.468.000,00	6.468.000,00	
- Belanja Barang & Jasa		2.831.577.250,00	2.826.590.500,00	
- Belanja Modal		-	-	
Jumlah		2.838.045.250,00	2.833.058.500,00	
Kegiatan 6	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai		-	-	
- Belanja Barang & Jasa		179.417.000,00	179.327.000,00	
- Belanja Modal		-	-	
Jumlah		179.417.000,00	179.327.000,00	
Kegiatan 7	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai		-	-	
- Belanja Barang & Jasa		46.394.750,00	45.966.750,00	
- Belanja Modal		-	-	
Jumlah		46.394.750,00	45.966.750,00	
Kegiatan 8	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai		3.840.000,00	3.840.000,00	
- Belanja Barang & Jasa		192.993.250,00	190.551.600,00	
- Belanja Modal		-	-	

Jumlah		196.833.250,00	194.391.600,00	
Kegiatan 1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
Kegiatan 1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	
- Belanja Pegawai		4.116.000,00	4.116.000,00	
- Belanja Barang & Jasa		519.412.000,00	519.243.000,00	
- Belanja Modal		-	-	
Jumlah		523.528.000,00	523.359.000,00	
Kegiatan 2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	
- Belanja Pegawai		-	-	
- Belanja Barang & Jasa		18.015.360,00	17.685.000,00	
- Belanja Modal		-	-	
Jumlah		18.015.360,00	17.685.000,00	
Kegiatan 3	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	
- Belanja Pegawai		-	-	
- Belanja Barang & Jasa		3.700.000,00	3.600.000,00	
- Belanja Modal		-	-	
Jumlah		3.700.000,00	3.600.000,00	
Kegiatan 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	
- Belanja Pegawai		-	-	
- Belanja Barang & Jasa		-	-	
- Belanja Modal		224.255.570,00	223.943.500,00	
Jumlah		223.943.500,00	223.943.500,00	
Kegiatan 2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	
- Belanja Pegawai		-	-	
- Belanja Barang & Jasa		75.806.985,00	71.053.150,00	
- Belanja Modal		-	-	
Jumlah		75.806.985,00	71.053.150,00	
Kegiatan 1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
Kegiatan 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	
- Belanja Pegawai		-	-	
- Belanja Barang & Jasa		-	-	
- Belanja Modal		60.703.500,00	60.472.500,00	
Jumlah		60.703.500,00	60.472.500,00	

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Posisi keuangan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 s.d. 2021

Posisi Keuangan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Aset	2.623.986.803,28	2.410.723.342,74	3.789.931.554,26	3.050.204.773,97	3.049.105.370,97
2. Kewajiban	7.625.457,00	99.921.638,00	95.085.039,00	111.838.646,00	110.739.643,00
3. Ekuitas	2.616.361.346,28	2.310.801.704,74	3.694.846.515,26	2.938.366.127,97	2.938.365.727,97
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	2.623.986.803,28	2.410.723.342,74	3.789.931.554,26	3.050.204.773,97	3.049.105.370,97

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut:

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya, khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah. Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
a) Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak PAD yang dipungut oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
b) Belanja Daerah	12.468.642.278,00	12.305.011.311,00	12.490.665.083,00

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, Realisasi belanja dan transfer tahun 2021 sebesar Rp. 12.305.011.311,00 Realisasinya mencapai 98,69 % dari anggaran sebesar Rp. 12.468.642.278,00. Dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi belanja dan transfer Tahun 2020 turun 23,53%.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1) Belanja Operasi	12.107.876.223,00	11.949.542.161,00	12.359.677.083,00

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel : 3.1.b.1. Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 dan 2020

No	Belanja Operasi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	4.086.858.053,00	4.065.221.027,00	99,47	4.774.624.413,00
2	Belanja Barang dan Jasa	8.021.018.170,00	7.884.321.134,00	98,30	7.585.052.670,00
	Jumlah	12.107.876.223,00	11.949.542.161,00		12.359.677.083,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(a) Belanja Pegawai	4.086.858.053,00	4.065.221.027,00	4.774.624.413,00

Belanja pegawai meliputi belanja operasi dan belanja langsung. Belanja pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai-belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : 3.1.b.1.a Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	BELANJA OPERASI				BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	2.145.736.193	2.139.915.929	99,73	2.066.947.041,00
2	Tunjangan keluarga	244.249.920	242.425.618	99,25	234.049.596,00
3	Tunjangan jabatan	161.180.000	161.130.000	99,97	133.447.880,00
4	Tunjangan fungsional				
5	Tunjangan fungsional umum	78.455.000	78.410.000	99,94	84.635.000,00
6	Tunjangan beras	148.661.726	147.954.060	99,52	124.127.880,00

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	BELANJA OPERASI				BELANJA TIDAK LANGSUNG
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	3.694.536	3.384.199	91,60	2.456.516,00
8	Pembulatan gaji	35.328	32.203	91,15	30.021,00
9	Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian	17.454.976	17.081.578	97,86	17.108.035,00
10	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1.240.159.882	1.227.656.948	98,99	1.164.315.444,00
	Jumlah belanja pegawai tidak langsung	-	=	99,46	3.827.117.413,00
	BELANJA LANGSUNG				
1	Honorarium PNS				69.060.000,00
2	Honorarium Non PNS				708.000.000,00
2	Uang lembur PNS				176.505.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai Langsung				919.035.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai	4.086.858.053,00	4.065.221.027,00	99,47	4.814.275.476,00

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(b) Belanja Barang dan Jasa	8.021.018.170,00	7.884.321.134,00	7.585.052.670,00

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.1.b.1.b Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2021

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Persediaan	1.062.527.060,00	938.871.080,00	533.001.068,00
2	Belanja Jasa	6.349.976.080,00	6.337.665.008,00	5.961.958.401,00
3	Belanja Pemeliharaan	287.636.030,00	287.510.801,00	438.270.421,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	320.879.000,00	320.274.245,00	650.625.980,00
5	Belanja Lainnya	0,00	0,00	1.196.800,00
	Jumlah	8.021.018.170,00	7.884.321.134,00	7.585.052.670,00

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ke tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp. 533.001.068,00, terinci sebagai berikut.

Tabel 3.1.b.1.b.1 Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2021

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja alat tulis kantor	105.805.480,00	105.523.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.070.890,00	16.070.890,00
3	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	6.300.000,00	6.300.000,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.667.270,00	12.667.270,00
6	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	18.015.360,00	17.685.000,00
7	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	282.090.000,00	282.085.860,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	16.525.300,00	16.525.300,00
9	Belanja cetak	78.923.760,00	78.734.450,00
10	Belanja makanan dan minuman rapat	13.665.000,00	13.665.000,00
11	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	232.140.000,00	208.915.000,00
12	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	217.074.000,00	119.152.000,00
13	Belanja Pakaian Olahraga	63.250.000,00	61.547.310,00
	Jumlah	1.062.527.060,00	938.871.080,00

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor, sewa, ongkos/upah kerja, belanja pelatihan/kursus, jasa konsultasi, belanja operasi pemeriksaan, dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 6.337.665.008,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.b.1.b.2: Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021

No.	Belanja jasa	Anggaran	Realisasi
1	Belanja telepon	4.710.000,00	4.710.000,00
2	Belanja air	3.510.000,00	2.521.250,00
3	Belanja listrik	52.822.080,00	52.320.208,00
4	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.600.000,00
5	Belanja kawat/faksimili/internet	5.520.000,00	5.520.000,00
6	Belanja paket/pengiriman	0,00	0,00
7	Belanja dekorasi	0,00	0,00
8	Belanja jasa promosi/publikasi/advertising	0,00	0,00
9	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	213.840.000,00	212.700.790,00
10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8.580.000,00	8.501.670,00
11	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	10.710.000,00	10.627.090,00
12	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	805.000.000,00	803.300.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	36.000.000,00	36.000.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	122.400.000,00	122.400.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.191.200.000,00	4.189.500.000,00
16	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.150.000,00	20.150.000,00
17	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47.400.000,00	47.400.000,00
18	Belanja Lembur	824.534.000,00	818.414.000,00
	Jumlah	6.349.976.080,00	6.337.665.008,00

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 287.510.801,00, terinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.b.1.b.3 : Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2021

No.	Belanja Pemeliharaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	55.212.500,00	55.212.500,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	125.623.000,00	125.622.601,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	53.400.000,00	53.399.200,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.600.000,00	3.600.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.100.000,00	9.100.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	9.100.000,00	9.100.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	14.346.008,00	14.300.000,00

9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	13.254.522,00	13.176.500,00
	Jumlah	287.636.030,00	287.510.801,00

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. **320.274.245,00** terinci sebagai berikut.

Tabel 3.1.b.1.b.4 : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.189.000,00	43.138.245,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	277.690.000,00	277.136.000,00
	Jumlah	320.879.000,00	320.274.245,00

(5) Belanja Lainnya

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 0,00 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.1.b.1.b.5 : Realisasi Belanja Lainnya Tahun 2021

No.	Belanja Lainnya	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

	<u>Anggaran TA 2021 (Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2021 (Rp)</u>	<u>Realisasi TA 2020 (Rp)</u>
(c) Belanja Modal	360.766.055,00	355.469.150,00	130.988.000,00

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1.b.1.c : Realisasi Belanja Modal Tahun 2021

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Tanah				
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	284.959.070,00	284.416.000,00	99,81	130.988.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75806985	71053150	93,73	
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
6	Belanja Modal Aset Lainnya				
	Jumlah	360.766.055,00	355.469.150,00	98,53	130.988.000,00

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut:

Tabel : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
Kas di bendahara penerimaan	0,00	0,00
Kas lainnya	0,00	0,00
Piutang pajak	0,00	0,00
Piutang retribusi	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00
Biaya Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	6.085.640,00	6.161.830,00
Jumlah	6.085.640,00	6.161.830,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.2.a : Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2021 dan 2020

	2020		2021	
	Saldo 31 Desember 2020		Saldo 31 Desember 2021	
		0,00		0,00
1. Penerimaan :				
- SP2D UP	750.000.000,00		350.000.000,00	
- SP2D TUP	831.548.584,00		1.670.383.000,00	
- SP2D GU	3.078.203.895,00		2.369.491.297,00	
- Penerimaan PFK	-			
Jumlah Penerimaan		4.659.752.479,00		4.389.874.297,00
2. Pengeluaran :				
- SPJ UP/GU	3.078.203.895,00		2.719.491.297,00	
- SPJ GU Nihil	1.412.464.911,00		220.558.682,00	
- Setor kembali sisa TUP	143.512.974,00		436.554.953,00	
- Setor kembali sisa UP/GU	25.570.699,00		79.441.318,00	
- Pengeluaran PFK	-			-
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	-			-
Jumlah pengeluaran		4.659.752.479,00		3.456.046.250

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
b) Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Pada akhir periode saldo kas di bendahara penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2021.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 Rincian mutasi kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut.

Tabel 3.2.b : Rincian saldo kas di bendahara penerimaan Tahun 2021

Bulan	Saldo awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
Januari				
Pebruari				
Maret				
April				
Mei				
Juni				
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
Nopember				
Desember				
Jumlah				

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
e) Kas Lainnya	0,00	0,00

Kas Lainnya merupakan kas milik pemerintah daerah yang dikelola, dikuasai, dan di bawah tanggungjawab selain BUD, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara BLUD. Saldo kas lainnya yang merupakan sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler per 31 Desember 2021 yang dikelola langsung oleh Sekolah Negeri (SD, SMP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.2.c : Mutasi kas lainnya tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	2021	2020
1	Pendapatan Dana BOS	Rp.....	Rp.....
2	Pengeluaran Belanja BOS :		
3	Belanja Pegawai	Rp.....	Rp.....
4	Belanja Barang dan Jasa		
5	- Belanja Persediaan	Rp.....	Rp.....
6	- Belanja Jasa	Rp.....	Rp.....
7	- Belanja Pemeliharaan	Rp.....	Rp.....
8	- Belanja Perjalanan Dinas	Rp.....	Rp.....
9	- Belanja Lainnya	Rp.....	Rp.....
10	Jumlah Belanja Barang dan Jasa (5 s/d 9)	Rp.....	Rp.....
11	Belanja Modal	Rp.....	Rp.....
12	Jumlah Pengeluaran (3+10+11)	Rp.....	Rp.....
13	Sisa Dana BOS tahun berjalan (1(12)	Rp.....	Rp.....
14	Saldo Dana BOS Tahun Lalu	Rp.....	Rp.....
15	Pendapatan bunga bank	Rp.....	Rp.....
16	Biaya admin bank	(Rp.....)	(Rp.....)
17	Saldo Kas Lainnya per 31 Des. (13+14+15+16)	Rp.....	Rp.....

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3) Piutang Pajak	0,00	0,00

Piutang pajak merupakan hak pemerintah daerah atas pendapatan pajak daerah yang sudah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah, tetapi sampai dengan 31 Desember masih belum diterima. Saldo piutang pajak per 31 Desember 2021 dan 2020, terinci sebagai berikut.

	31 Des. 2021 (Rp)	31 Des. 2020 (Rp)
Piutang pajak reklame	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Piutang pajak mineral bukan logam	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Piutang pajak restoran	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Piutang pajak hiburan	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Piutang pajak air tanah	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Piutang PBB P2	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Piutang pajak penerangan jalan	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Jumlah	XXXXXXXX	XXXXXXXX

a) Piutang Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak daerah yang pemungutannya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (*Official Assessment*). Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 terinci sebagai berikut:

Tabel Perkembangan Piutang Pajak Reklame

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2021	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2020
2017	XXXXXXXX		XXXXXXXX	XXXXXXXX
2018	XXXXXXXX		XXXXXXXX	XXXXXXXX
2019	XXXXXXXX		XXXXXXXX	XXXXXXXX
2020	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Jumlah	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

Penambahan sebesar RpXXXXXXXX merupakan jumlah Surat Ketetapan Pajak Reklame yang diterbitkan tahun anggaran 2020. Pengurangan sebesar RpXXXXXXXX merupakan Penerimaan piutang di tahun 2020 meliputi piutang periode sebelumnya sebesar RpXXXXXXXX dan piutang tahun 2020 sebesar RpXXXXXXXX

Penyisihan piutang pajak reklame tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2021

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2021
Lancar	< 1 tahun		0,5%	
Kurang Lancar	1 – 2 tahun		10	
Diragukan	>2 – 5 Tahun		50	
Macet	> 5 Tahun		100%	
Jumlah				

b) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan sistem *Self Assessment*. Saldo piutang pajak mineral bukan logam per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 . Jumlah tersebut merupakan piutang tahun xxxx dan xxxxx yang belum tertagih sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1. Perkembangan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2020	Penambahan Piutang	Pelunasan Piutang	Saldo 31 Des 2021
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Jumlah	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Penyisihan piutang pajak mineral bukan logam tahun 2017 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel 2. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2021

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2021
Lancar	< 1 tahun	XXXXXXXXXX	0,5%	XXXXXXXXXX
Kurang Lancar	1 – 2 tahun	XXXXXXXXXX	0%	XXXXXXXXXX
Diragukan	>2 – 5 Tahun	XXXXXXXXXX	0%	XXXXXXXXXX
Macet	> 5 Tahun	XXXXXXXXXX	100%	XXXXXXXXXX
Jumlah		XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX

c) **Piutang Pajak Restoran**

Pajak restoran pemungutannya menggunakan sistem *Self Assessment*. Saldo piutang pajak restoran per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 3. Perkembangan Piutang Pajak Restoran

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2020	Penambahan Piutang	Pelunasan Piutang	Saldo 31 Des 2021
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Jumlah	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Penyisihan piutang pajak restoran tahun 2020 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut:

Tabel 4. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Restoran Tahun 2020

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2021
Lancar	< 1 tahun	XXXXXXXXXX	0,0%	XXXXXXXXXX
Kurang Lancar	1 – 2 tahun	XXXXXXXXXX	0%	XXXXXXXXXX
Diragukan	>2 – 5 Tahun	XXXXXXXXXX	0%	XXXXXXXXXX
Macet	> 5 Tahun	XXXXXXXXXX	100%	XXXXXXXXXX
Jumlah		XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4) Piutang Retribusi	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 terinci sebagai berikut:

	31 Des 2021	31 Des 2020
Retribusi Pelayanan Kesehatan	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Piutang Retribusi Pemakaian Kawasan Daerah	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Piutang Retribusi Terminal	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO)	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Piutang Retribusi IMB	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Jumlah	<u>XXXXXXXXXX</u>	<u>XXXXXXXXXX</u>

a) **Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00, terinci sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No	Retribusi Pelayanan Kesehatan	31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021
1	Laboratorium Kesehatan	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
2	Sewa tanah puskesmas untuk ATM (Dinkes)	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
3	Pelayanan Kesehatan RSUD Pasirian	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

4	Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi(BPJS Puskesmas	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	Jumlah	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

Penambahan sebesar Rp. 0,00 meliputi:

- Sebesar Rp. 0,00 merupakan jasa pelayanan kesehatan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021,
- Pelayanan kesehatan non kapitasi BPJS diPuskesmas sebesar Rp. 0,00 yang belum diterima sampai dengan akhir periode akuntansi.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp. 0,00 meliputi:

- Klaim kepada PT. Askes/BPJS yang telah mendapatkan persetujuan pada bulan Oktober 2016 dan telah di terima tahun 2017,
- Pendapatan sewa tanah puskesmas untuk ATM yang telah diterima sebesar Rp. 0,00,

Penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2021 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2021

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Des 2021	Kualitas Piutang			
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
1	Piutang Pelayanan Kesehatan	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	Penyisihan Piutang	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
2	Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi(BPJS Puskesmas	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	Penyisihan piutang	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	Jumlah Piutang (1) + (2)	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	Jumlah Penyisihan Piutang (1) + (2)	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

b) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Saldo piutang retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 terinci sebagai berikut.

Tabel..... Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2021
I	Retribusi Pasar Umum				
1	Pasar Baru Lumajang	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
2	Pasar Plaza	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
3	Pasar Serangin	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
7	Dst	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	Jumlah (1)	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
II	Ret. Daftar Ulang				
1	Baru Lumajang	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
2	Plaza Lumajang	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
4	Dst	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	Jumlah (2)	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
III	Ret. Perijinan Pasar				
1	H. Jogotrunan	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
2	Serangin	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
3	Pasirian	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
4	Dst	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	Jumlah (3)	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	Jumlah (1+2+3)	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

Penyisihan piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2021 berdasarkan umur piutang terinci sebagai berikut.

Tab..... Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 2020

Kualitas Piutang	Umur Piutang Retribusi	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang per 31 Des 2021
Lancar	< 1 bulan	XXXXXXXX	0,5%	XXXXXXXX
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	XXXXXXXX	10%	XXXXXXXX
Diragukan	>3 – 12 bulan	XXXXXXXX	50%	XXXXXXXX
Macet	> 12 bulan	XXXXXXXX	100%	XXXXXXXX
Jumlah		XXXXXXXX		XXXXXXXX

7) Penyisihan Piutang Tak Tertagih (0,00) (0,00)

Berdasarkan saldo piutang per 31 Desember 2021, jumlah penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp. 0,00) dan sebesar (Rp. 0,00) 2020, untuk setiap jenis piutang.

Tabel : Daftar Mutasi Penyisihan Piutang Tahun 2021

Penyisihan Piutang	Saldo Akhir 31 Des 20	Koreksi tahun Berjalan	Mutasi Bertambah (Berkurang)	Saldo Akhir 31 Des 21
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK				
Penyisihan Piutang Pajak	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Penyisihan Piutang Retribusi	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Penyisihan Piutang lainnya	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Dst....	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH (1+2+3)	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
8) Persediaan	<u>6.085.640,00</u>	<u>6.161.830,00</u>

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian diukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 3.8. Laporan Persediaan Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Persediaan per 31 Desember 2020	6.161.830,00
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal	0
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)	6.161.830,00
4	Ditambah :	
5	Belanja Persediaan LRA 2021	938.871.080,00
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	0
7	Belanja Persediaan BOS	0
8	Penerimaan hibah persediaan	0
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	938.871.080,00
10	Dikurangi :	
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2021	0
12	Pengeluaran hibah persediaan	0
13	Jumlah tambahan persediaan bersih	945.032.910,00
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan	945.032.910,00
15	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)	938.947.270,00
16	Persediaan tahun 2021	6.085.640,00

Tabel 6. Daftar Persediaan Tahun 2021 dan 2020

No	Persediaan	<i>dalam rupiah</i>	
		2021	2020
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	463.100,00	723.900,00
2	Persediaan Barang cetakan	3.731.200	2.135.400,00
3	Perabot Kantor	127.160,00	
4	Persediaan Material/Bahan		
5	Persediaan Bahan Baku Bangunan		
6	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas		
7	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman		
8	Persediaan Obat-obatan		
9	Persediaan Bahan Kimia		
10	Persediaan bahan praktek kegiatan		
11	Persediaan alat kesehatan/ kedokteran		
12	Persediaan kebutuhan bidang kesehatan dan KB pakai habis selain obat(obatan)		

No	Persediaan	2021	2020
13	Persediaan Banda Pos		39.000,00
14	Persediaan Bahan Makanan Pokok		
15	Persediaan Bahan Makanan Pokok		
17	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih		
18	Persediaan alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)		
20	Persediaan pupuk dan pembasmi hama		
21	Bahan Pakai Habis Lainnya	1.764.180,00	3.234.330,00
22	Alat Peraga dan Mainan		
23	Barang yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga		
	Jumlah	6.085.640,00	6.161.830,00

b. ASET TETAP

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1) Aset Tetap	<u>2.365.034.874,88</u>	<u>2.866.381.923,97</u>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan/pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.2.b.1 : Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Awal 31-Des-20	Koreksi	Mutasi		Saldo 31-Des-21
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	69.696.000,00	-	-	-	69.696.000,00
2	Peralatan dan Mesin	7.303.824.701,00	-	315.472.650,00	-	7.619.297.351,00
3	Gedung dan Bangunan	641.909.034,14	-	71.053.150,00	-	712.962.184,14
4	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(5.149.047.811,17)	-	(31.056.650,00)	-	(6.036.920.660,26)
	Jumlah	2.866.381.923,97	-	(31.056.650,00)	0,00	2.365.034.874,88

Rincian koreksi aset tetap sebagai berikut:

- Koreksi kurang catat Rp. 0,00
- Koreksi lebih catat Rp. 0,00

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

- a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar **Rp. 315.472.650,00** meliputi:
- (1) Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp. **284.416.000,00**;
 - (2) Mutasi masuk (*transfer in*) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp. **31.056.650,00**.
 - (3) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. **(31.056.650,00)**

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(a) Tanah	69.696.000,00	69.696.000,00

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dan 2010 masing-masing sebesar Rp. 69.696.000,00 dan Rp. 69.696.000,00, terinci sebagai berikut:

Tabel 3.2.b.1.a Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2019	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2020
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah A	69.696.000,00	0,00	0,00	0,00	69.696.000,00
2	Tanah B					
3	Tanah C					
4	dsb					
	Jumlah	69.696.000,00	0,00	0,00	0,00	69.696.000,00

- Jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat 1 bidang

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	7.619.297.351,00	7.303.824.701,00

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 7.619.297.351,00 dan Rp. 7.303.824.701,000, terinci sebagai berikut:

Tabel 3.2.b.1.b Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31-Des-20	Koreksi	Mutasi		Saldo 31-Des-21
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-alat besar	43.767.500,00				43.767.500,00
2	Alat-alat Angkutan	5.421.824.200,00				5.421.824.200,00
3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur	-				
4	Alat-alat Pertanian	-				
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	973.191.136		196.991.650		1.170.182.780,00
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	449.910.240,00				
7	Alat-alat Kedokteran	-				
8	Alat-alat Laboratorium	-				
9	Alat-alat Persenjataan dan Keamanan	123.460.975,00		19.734.000		143.194.975,00
10	Komputer	273.062.650		80.707.000		353.769.650,00
11	Alat Eksplorasi					

12	Alat Pengeboran					
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian					
14	Alat Bantu Eksplorasi					
15	Alat Keselamatan Kerja	18.608.000				36.648.000,00
16	Alat Peraga					
17	Peralatan Proses/Produksi					
18	Rambu – Rambu					
19	Peralatan Olahraga					
	Jumlah	641.909.034,00	-	71.053.150,00		712.962.184,14

Penjelasan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

1. *Alat- alat besar : tidak ada perubahan*
2. *Alat-alat angkut : tidak ada perubahan*
3. *Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga:*
 - *Bertambah : **Rp. 196.991.650,00** :*
 - *belanja modal : **Rp. 196.991.650,00**, dengan rincian :*
 - 2 unit Selang Polyester 1,5x30cm Rp. 10.945.000,00*
 - 2 unit unit Selang Polyester 2,5x30cm Rp. 21.912.000,00*
 - 2 unit Strainer 2,5" Rp. 2.068.000,00*
 - 3 unit Y Connection 2,5+1,5" Rp. 13.117.500,00*
 - 10 unit Velbed Rp. 8.360.000,00*
 - 1 Paket CCTV Rp. 8.099.300,00*
 - 6 Unit Tempat Cuci Tangan Rp. 9.596.400,00*
 - 8 Meja Kerja Pejabat Rp. 44.360.800,00*
 - 8 Kursi Kerja Pejabat Rp. 21.604.000,00*
 - 4 Unit AC Rp. 33.176.000,00*
 - 1 Unit Laptop Rp.10.450.000,00*
 - *karena mutasi masuk antar SKPD Rp. 1.500.000,00, dengan rincian :*
 - dari Bagian Umum Rp. 1.500.000,00 :*
 - 3 unit Meja Staf Rp. 1.500.000,00*
 - *Karena mutasi masuk antar SKPD Rp. 29.556.650,00, dengan rincian :*
 - Dari RSUD dr. Haryoto Rp. 29.556.650,00 :*
 - 1 Unit Lemari Kayu Rp 2.156.650,00*
 - 6 Kursi Tunggu (Gang chair Y 405 Chrome) Rp 22.500.000,00*
 - 1 Unit Meja Distribusi Gizi Rp 4.900.000,00*
 - 4. *ALAT PERSENJATAAN*
 - 3 Unit Pakaian Tahan Panas Rp. 19.734.000,00*
 - 5. *KOMPUTER*
 - 6 Komputer PC/Pc Uni Rp. 53.229.000,00*
 - 6 Unit Printer Rp. 17.028.000,00*
 - 6. *ALAT KESELAMATAN KERJA*
 - 1 Unit Tenda Pleton Rp.18.040.000,00*

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	<u>712.962.184,14</u>	<u>641.909.034,14</u>

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan monumen. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.2.b.1.c Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	641.909.034,14	0,00	71.053.150,00	0,00	712.962.184,14
2	Monumen					
	Jumlah	641.909.034,14	0,00	71.053.150,00	0,00	712.962.184,14

Pada tahun 2020 tidak ada penambahan dan pengurangan aset gedung dan bangunan

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(d) Jalan, Irigasi & Jaringan	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Jumlah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang terinci pada tabel berikut ini:

Tabel..... Daftar Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2021

No	Jenis	Saldo 31 Desember 2020	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2021
1	Jalan	XXXXXXXX		XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
2	Jembatan	XXXXXXXX		XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
3	Bangunan Air/Irigasi	XXXXXXX		XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
4	Instalasi	XXXXXXX		XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
5	Jaringan	XXXXXXX		XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	Jumlah	XXXXXXX		XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

Tabel Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	31 Des 2020	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021
1	Buku dan Pepustakaan	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
3	Hewan Ternak dan Tanaman	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
	Jumlah	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(f) Konstruksi Dalam Pengerjaan	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut:

Tabel Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap KDP per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	31 Des 2020	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021
1		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
2		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
3		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX
	Jumlah	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(g) Akumulasi Penyusutan	<u>(6.036.920.660,26)</u>	<u>(5.149.047.811,17)</u>

Saldo Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. (6.036.920.660,26) dan Rp. (5.149.047.811,17) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.b.1.g. Daftar Perkembangan Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021

Uraian	Akumulasi Penyusutan 31/12/2020	Mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2021		Beban Penyusutan 2021	Akumulasi Penyusutan 31/12/2021
		Masuk	keluar		
GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	5.011.432.864,65	31.056.650,00		842.769.514,40	5.885.259.029,05
ALAT - ALAT BESAR	43.242.937,50			74.937,50	43.317.875,00
ALAT - ALAT ANGKUT	3.560.103.312,50			611.044.837,50	4.171.148.150,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-				
ALAT PERTANIAN	-				
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	825.161.912,00	31.056.650,00		87.334.708,00	943.553.270,00
ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	281.014.040,00			51.144.800,00	332.158.840,00
ALAT - ALAT KEDOKTERAN	-				
ALAT LABOLATORIUM	-				
ALAT - ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN	58.175.012,65			32.945.481,40	91.120.494,05
KOMPUTER	225.127.650,00			56.616.750,00	281.744.400,00
ALAT KESELAMATAN KERJA	18.608.000,00			3.608.000,00	22.216.000,00
GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	137.614.946,52			14.046.684,69	151.661.631,21
GEDUNG DAN BANGUNAN	137.614.946,52			14.046.684,69	151.661.631,21
JUMLAH	5.149.047.811,17	31.056.650,00		856.816.199,09	6.036.920.660,26

Penjelasan Mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2020 :

1. Mutasi Masuk antar SKPD Rp. 31.056.650,00, dengan rincian :

- dari Bagian Umum Rp. 1.500.000,00 :
3 unit Meja Staf Rp. 500.000,00

- dari RSUD Hariyoto Rp. 29.556.650,00 :
1 unit Lemari Kayu Rp. 2.156.650,00
6 unit kursi tunggu Rp.22.500.000,00
1 unit meja Distribusi Rp.4.900.000,00

c. ASET LAINNYA

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
1) Aset Lainnya	<u>177.660.620,00</u>	<u>177.660.620,00</u>

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 177.660.620,00 sedangkan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 177.660.620,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 3.2.c.1 Daftar Rincian Aset lainnya per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2021
1	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aset Lain lain	177.660.620,00	0,00	0,00	177.660.620,00
	Jumlah	177.660.620,00	0,00	0,00	177.660.620,00

Aset lain-lain sejumlah Rp. 177.660.620,00 terdiri dari dua item yaitu:

1. aset lain-lain berupa Aset tetap yang rusak dan rusak berat sejumlah Rp. 129.680.870,00
2. aset lain-lain berupa Anggaran Tahun 2010 yang belum ter-SPJ-kan hingga akhir tahun 2020 karena ada permasalahan dengan Polres Lumajang senilai Rp.47.979.750,00

Perkembangan SPJ ini sudah ada pada Satuan Polisi Pamong Praja, untuk penyelesaiannya menunggu sidang TPPGR.

Pada Tahun Anggaran 2021 tidak ada mutasi atas aset lain-lain.

d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp. 110.739.643,00 dan Rp.111.838.646,00 diuraikan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	<u>110.739.643,00</u>	<u>111.838.646,00</u>

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 110.739.643,00 dan Rp. 111.838.646,00. Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang PFK, pendapatan diterima di muka dan utang belanja.

	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)
(a) Utang PFK	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Utang PFK timbul karena pelaksanaan aktivitas non anggaran meliputi penerimaan dan pengeluaran kas atas potongan (potongan SP2D baik oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara umum daerah.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 utang PFK masing-masing sebesar Rpxxxx dan Rp. Xxxxx terinci sebagai berikut.

Tabel Daftar Rincian Utang PFK per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2019	Pungutan	Penyetoran	31 Desember 2020
1	PPH ps21	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
2	PPH. Ps. 22	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
3	PPN	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
4	dts	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Jumlah	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
(b) Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

Pemerintah daerah menggunakan pendekatan pendapatan dalam mencatat transaksi pendapatan daerah. Dengan pendekatan pendapatan, maka setiap penerimaan pendapatan daerah seluruhnya di akui dan dicatat sebagai pendapatan, meskipun terdapat kemungkinan dari pendapatan yang diterima belum menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan daerah yang sudah diterima di rekening kas umum daerah, tetapi pemerintah daerah belum punya hak atas pendapatan tersebut. Pada akhir periode akuntansi pemerintah daerah akan melaporkan di neraca atas pendapatan yang belum menjadi hak tetapi sudah diterima sebagai pendapatan diterima di muka.

Pada akhir tahun 2021 dan 2020 saldo pendapatan diterima di muka masing-masing sebesar Rpxxxx dan Rpxxxx yang merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa ATM, Pendapatan Parkir Berlangganan, Pendapatan diterima dimuka atas sewa gedung. Jumlah tersebut tercatat di beberapa entitas akuntansi sebagai berikut.

Tabel Daftar Rincian Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021

No	Jenis	31 Desember 2016	Penambahan	pengurangan	31 Desember 2017
1	Pendapatan Sewa	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
2	Parkir berlangganan	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
3	dll	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Jumlah	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(c) Utang Lain-lain	0,00	0,00

Utang lain adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, meliputi:

- Utang bagi hasil Pajak Daerah ke desa sebesar Rpxxxx, merupakan bagi hasil pajak daerah tahun 2021 yang belum di salurkan kepada Desa sampai dengan tanggal pelaporan.
- Utang bagi Hasil Pendapatan Lainnya Rpxxxx0 merupakan bagi hasil retribusi daerah ke desa tahun 2021 yang belum di salurkan kepada Desa sampai dengan tanggal pelaporan;
- Utang Dana Desa sebesar Rpxxxx, merupakan Dana Desa tahun 2021 yang belum disalurkan ke Desa. Total penerimaan Dana Desa tahun 2021 sebesar Rpxxxxxxx dan jumlah yang sudah disalurkan sebesar Rpxxxxxxx

	31 Desember 2020	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
(d) Utang Belanja	111.838.646,00	110.739.643,00

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp. 110.739.643,00 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp. 101.959.626,00, utang belanja jasa

Rp. 8.780.017,00, dan utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 0,00, sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 3.2.d.1.d Rincian Utang Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Utang Belanja pegawai	104.396.242,00			101.959.626,00
2	Utang Belanja Jasa	7.442.404,00			8.780.017,00
3	Utang Belanja Pemeliharaan				
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	Jumlah	111.838.646,00			110.739.643,00

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 101.959.626,00 merupakan kewajiban atas Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja bulan Desember 2021 yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2021.

Tabel 3.2.d.1.d.1 Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2020	Pengurangan 2020	31 Des 2021
1	Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja	104.396.242,00	-	-	101.959.626,00
	Jumlah	104.396.242,00	-	-	101.959.626,00

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 8.780.017,00 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, air PDAM, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut:

Tabel 3.2.d.1.d.2 Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2020

No	Jenis Utang	31 Des 2020	31 Des 2021
1	Jasa telepon	365.500,00	707.457,00
2	PDAM	177.500,00	273.200,00
3	Jasa listrik	6.535.004,00	6.298.900,00
4	Jasa internet	364.400,00	1.500.460,00
	Jumlah	7.442.404,00	8.780.017,00

Penambahan 2021 : berupa pemakaian jasa telpon, air, listrik dan internet di bulan Desember 2021 yang belum muncul tagihan hingga 31 Desember 2021

Pengurangan 2021 : berupa pemakaian air dan listrik di bulan Desember 2021 yang telah dibayar pada bulan Januari 2021

e. EKUITAS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1) Ekuitas	<u>2.938.365.727,97</u>	<u>2.438.041.491,88</u>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.2.e.1 Daftar Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2021

dalam rupiah

No	Akun	31 Desember 2020	31 Desember 2021
1	Jumlah Aset	3.050.204.373,97	2.548.781.134,88
2	Jumlah Kewajiban	111.838.646,00	110.739.643,00
3	Ekuitas (1(2))	2.938.365.727,97	2.438.041.491,88

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Tabel 7. Daftar Rincian Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Uraian	2020	2021
1	Ekuitas Awal	3.694.846.515,26	2.938.365.727,97
2	Surplus (Defisit) LO	(13.237.824.270,29)	(12.819.810.547,09)
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar	12.481.343.483,00	12.319.486.311,00
4	EKUITAS AKHIR	2.938.365.727,97	2.438.041.491,88

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

a. Pendapatan LO

1) Pendapatan Asli Daerah – LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
a) Pendapatan Pajak Daerah LO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Pendapatan pajak LO yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021.		

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
b) Pendapatan Retribusi Daerah LO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Pendapatan retribusi daerah LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 dan 2021.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan LO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(2) Retribusi Pelayanan Persampahan LO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(3) Retribusi Parkir di tepi jalan umum LO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(4) Retribusi Pelayanan Pasar LO	<u>.....</u>	<u>.....</u>

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(6) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi LO	0,00	0,00
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang LO	0,00	0,00
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LO	0,00	0,00
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(9) Retribusi Terminal LO	0,00	0,00
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(10) Retribusi Tempat Khusus Parkir LO	0,00	0,00
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(11) Retribusi rumah potong hewan LO	0,00	0,00
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(12) Retribusi tempat rekreasi dan Olahraga LO	0,00	0,00
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(13) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)- LO	0,00	0,00
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(14) Retribusi Ijin Gangguan LO	0,00	0,00
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(15) Retribusi Ijin Trayek LO	0,00	0,00
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
d) Pendapatan Asli Daerah Lainnya – LO	0,00	0,00
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2) Lain-lain Pendapatan Yang Sah	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)

a) Pendapatan Hibah - LO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
b) Pendapatan Lainnya – LO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

b. BEBAN

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1) Beban Pegawai-LO	<u>4.784.878.260,00</u>	<u>4.062.784.411,00</u>

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020 dan 2021, sebagai berikut.

Tabel 8. Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2020 dan 2021

dalam rupiah

Uraian	2020	2021
Belanja Gaji Pegawai LRA	4.774.624.413,00	4.065.221.027,00
DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
Utang Belanja Pegawai 2021	104.396.242,00	101.959.626,00
DIKURANGI : Beban Pegawai tahun sebelumnya yang dibayar pada tahun 2020		
Utang Belanja Pegawai 2020	(94.142.395,00)	104.396.242,00
Jumlah Belanja Pegawai Lo	4.784.878.260,00	4.062.784.411,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO	<u>7.592.722.280,00</u>	<u>7.900.209.937,00</u>

Beban barang dan jasa yang menjadi beban OPD Satuan Polisi Pamong Praja meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2020 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel 9. Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2021

dalam rupiah

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Beban Persediaan	534.170.918,00	938.947.270,00
2	Beban Jasa	5.968.458.161,00	6.339.002.621,00
3	Beban Pemeliharaan	438.270.421,00	301.985.801,00
4	Beban Perjalanan Dinas	650.625.980,00	320.274.245,00
5	Beban Lainnya	1.196.800,00	0,00
	Jumlah	7.592.722.280,00	7.900.209.937,00

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(a) Beban Persediaan	<u>534.170.918,00</u>	<u>938.947.270,00</u>

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2020 dan 2019, terinci sebagai berikut.

Tabel 10. Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

Keterangan	2020	2021
1. Belanja Persediaan LRA	533.001.068,00	938.871.080,00
Ditambah		

2.	Pembebanan Persediaan 31 Desember tahun lalu	7.331.680,00	6.161.830,00
3.	Jumlah Persediaan yang siap digunakan (1+2)	540.332.748,00	945.032.910,00
	Dikurangi		
4.	Persediaan barang akhir Periode 31 Desember.	(6.161.830)	(6.085.640,00)
5.	Jumlah Pengurangan (4)	(6.161.830)	(6.085.640,00)
6.	Beban Persediaan (3(5))	534.170.918,00	938.947.270,00

Tabel 11. Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2021

dalam rupiah

No.	Beban Persediaan	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Beban Bahan Pakai habis	109.863.230,00	
	Beban Pakaian Olahraga	0,00	61.547.310,00
2	Beban Bahan / Material	18.792.000,00	
3	Beban Cetak dan Penggandaan	61.037.370,00	
4	Beban Makanan dan Minuman Rapat	108.575.000,00	13.665.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan	0,00	208.915.000,00
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya		119.152.000,00
6	Beban Pakaian Kerja	162.632.000,00	
7	Beban Pakaian Khusus Hari(hari Tertentu	56.631.318,00	
8	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.640.000,00	
9	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
10	Beban Persediaan dana BOS		
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		16.100.090,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		12.540.110,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		6.339.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		77.138.650,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		105.783.800,00
	Beban Bahan-Bahan Lainnya		17.995.450,00
	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran		17.685.000,00
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		282.085.860,00
	Jumlah Beban Persediaan	534.170.918,00	938.947.270,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
(b) Beban Jasa	<u>5.968.458.161,00</u>	<u>6.339.002.621,00</u>

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultasi dan beban jasa lainnya. Jumlah beban jasa tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 5.968.458.161,00 dan Rp. 6.339.002.621,00.

Tabel 12. Daftar Rincian Beban Jasa Tahun 2020 dan 2019

dalam rupiah

No	Jenis Beban Jasa	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Beban Jasa Kantor	1.753.568.381,00	
2	Beban Premi Asuransi	209.405.780,00	231.829.550,00
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	3.000.000,00	
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	
5	Beban Sewa Alat Berat		
6	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan		
7	Beban Beasiswa Pendidikan PNS		

8	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS		
9	Beban Jasa Konsultansi		
10	Beban Upah/Ongkos Tenaga Kerja	4.002.484.000,00	
11	Beban Operasional Pemeriksaan Internal		
12	Beban Barang dan Jasa pada BLUD		
13	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis		
14	Beban Dana Bos		
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		10.627.090,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		8.501.670,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		212.700.790,00
	Beban Lembur		818.414.000,00
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		6.656.060,00
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		3.600.000,00
	Beban Tagihan Listrik		52.084.104,00
	Beban Tagihan Air		2.616.950,00
	Beban Tagihan Telepon		5.051.957,00
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara		803.300.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan		36.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi		122.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		4.189.500.000,00
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		47.400.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		20.150.000,00
	Jumlah	5.968.458.161,00	6.339.002.621,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
(c) Beban Pemeliharaan	438.270.421,00	301.985.801,00

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 438.270.421,00 dan Rp. 301.985.801,00

Tabel 13. Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2020 dan 2021
dalam rupiah

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	410.094.421,00	
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus		53.399.200,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		125.622.601,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		55.212.500,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		260.034.301,00
2	Beban Pemeliharaan Alat-Alat Besar Darat		
3	Beban Pemeliharaan Alat-alat Bantu		
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor		
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		

6	Beban Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor		
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor		
8	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel Bermesin		
9	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel Tak Bermesin		
10	Beban Pemeliharaan Alat Ukur		
11	Beban Pemeliharaan Alat Pengolahan		
12	Beban Pemeliharaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan		
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor		
14	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	4.200.000,00	14.475.000,00
15	Beban Pemeliharaan Komputer personal komputer	18.000.000,00	9.100.000,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer		9.100.000,00
16	Beban Pemeliharaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
17	Beban Pemeliharaan Alat Studio		
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		3.600.000,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi	5.976.000,00	0,00
19	Beban Pemeliharaan Peralatan Pemancar		
20	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran		
21	Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan		
22	Beban Pemeliharaan Unit Unit Laboratorium		
23	Beban Pemeliharaan Alat Peraga/Praktek Sekolah		
24	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		
25	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja		14.300.000,00
26	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang		13.176.500,00
	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		27.476.500,00
27	Beban Pemeliharaan Monumen/Bangunan Bersejarah		
28	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti		
28	Beban Pemeliharaan Rambu(Rambu Lalu Lintas Darat		
29	Beban Pemeliharaan Jalan		
30	Beban Pemeliharaan Jembatan		
31	Beban Pemeliharaan Bangunan Air Irigasi		
32	Beban Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam		
33	Beban Pemeliharaan Bangunan Air Kotor		
34	Beban Pemeliharaan Instalasi Air Minum/Bersih		
35	Beban Pemeliharaan Instalasi Air Kotor		
36	Beban Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Sampah		
37	Beban Pemeliharaan Instalasi Gardu Listrik		
38	Beban Pemeliharaan Jaringan Air Minum		
39	Beban Pemeliharaan Jaringan Listrik		
40	Beban Pemeliharaan Jaringan Telepon		
41	Beban Pemeliharaan Aset tetap Lainnya		

42	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya		
43	Beban Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung		
	Jumlah	438.270.421,00	287.510.801,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
(d) Beban Perjalanan Dinas	<u>650.625.980,00</u>	<u>320.274.245,00</u>

Beban perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dengan saldo sebagai berikut:

Tabel 14. Daftar Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2021

dalam rupiah

No	Beban Perjalanan Dinas	2020	2021
1	Beban Perjalanan Dinas dalam kota		
2	Beban perjalanan dinas dalam daerah	577.950.000,00	
3	Beban perjalanan dinas luar daerah	72.675.980,00	
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		277.136.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa		43.138.245,00
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	650.625.980,00	320.274.245,00

Tabel 15. Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 dan 2021

dalam rupiah

No	Nama Akun	Belanja Perjalanan Dinas LRA	Beban Perjalanan Dinas 2020 Terutang	Pembayaran Perjalanan dinas tahun 2021	Beban Perjalanan Dinas LO
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	577.950.000,00	0,00	0,00	277.136.000,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.675.980,00	0,00	0,00	43.138.245,00
	Jumlah	650.625.980,00			320.274.245,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
(e) Beban Lainnya	<u>1.196.800,00</u>	<u>0,00</u>

Beban lainnya merupakan beban yang tidak dapat dikategorikan sebagai beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, seperti perolehan barang-barang yang tidak menambah aset tetap atau barang-barang ekstrakomtabel.

Beban lainnya tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 1.196.800,00 dan Rp. 0,00 sebagai berikut.

Tabel 16. Daftar Rincian Beban Lain-lain LRA dan LO Tahun 2021

dalam rupiah

No	Uraian	Jumlah
	BELANJA LAINNYA – LRA	0,00
	PENAMBAHAN	0
1	Reklasifikasi Belanja Modal ke belanja/beban lainnya (barang ekstrakomtabel) karena tidak menambah aset tetap	0
	PENGURANGAN :	0
1	Reklasifikasi belanja/beban lainnya menambah aset tetap	0
	BEBAN LAINNYA LO	0,00

**Tabel 17. Daftar Rincian Beban Lain-lain (Beban atas Barang – barang Ekstrakomtabel)
Tahun 2020 dan 2021**

dalam rupiah

No	Beban Lainnya	2020	2021
1	Beban Alat (Alat Besar Darat		
2	Beban Alat-alat Bantu		
3	Beban Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		
4	Beban Alat Bengkel Bermesin		
5	Beban Alat Bengkel Tak Bermesin		
6	Beban Alat Ukur		
7	Beban Alat Pengolahan		
8	Beban Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan		
9	Beban Alat Kantor		
10	Beban Alat Rumah Tangga	1.196.800,00	0,00
11	Beban Komputer		
12	Beban Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
13	Beban Alat Studio		
14	Beban Alat Komunikasi		
15	Beban Peralatan Pemancar		
16	Beban Alat Kedokteran		
17	Beban Alat Kesehatan		
18	Beban Unit Unit Laboratorium		
19	Beban Alat Peraga/Praktek Sekolah		
20	Beban Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan		
21	Beban Peralatan Laboratorium Hidrodinamika		
22	Beban Peralatan Non Senjata Api		
23	Beban Bangunan Gedung Tempat Kerja		0,00
24	Beban Bangunan Menara		
25	Beban Tugu Titik Kontrol/Pasti		
26	Beban Rambu(Rambu Lalu Lintas Darat		
27	Beban Bangunan Air Kotor		
28	Beban Buku		
29	Beban Terbitan Berkala		
30	Beban Barang-barang Perpustakaan		
31	Beban Barang Bercorak Kebudayaan		
32	Beban Alat Olah Raga Lainnya		
33	Beban Hewan		
34	Beban Tanaman		
35	Beban Barang dan Jasa dana BOS		
	Jumlah	1.196.800,00	0,00

	31 Desember 2020	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
3) Beban Penyusutan dan Amortisasi	860.223.730,29	856.816.199,00

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 860.223.730,29 dan Rp. 856.816.199,00 sebagai berikut.

Tabel 18. Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 dan 2021

dalam rupiah

No	Beban Penyusutan	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	847.598.108,60	842.769.514,40
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.625.621,69	14.046.684,69
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan		
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya		
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap		
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		
	Jumlah	860.223.730,29	856.816.199,09

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
4) Beban Penyisihan Piutang	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang merupakan beban, agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*). Beban penyisihan piutang tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. 0,00 menambah jumlah penyisihan piutang tak tertagih di neraca per 31 Desember 2020.

Tabel 19. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020

dalam rupiah

Beban Penyisihan Piutang	Beban Penyisihan Piutang
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK	
Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame	
Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran	
Beban Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	
Beban Penyisihan Piutang Pajak Tanah	
Beban Penyisihan Piutang PBB	
Beban Penyisihan Piutang PPh	
Jumlah (1)	
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI	
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (inkes)	
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (bkes)	
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (kesmas)	
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Dasar	
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Terminal	
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO)	
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	
Beban Penyisihan Piutang Ret. Pelayanan Kesehatan RSUD Pasirian	
Jumlah (2)	
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA	
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	
Beban Penyisihan Piutang Pinjaman Modal Kepada Masyarakat	
Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi	
Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat	
Beban Penyisihan Piutang lainnya kerugian daerah	
Beban Penyisihan Piutang Sewa Kebun Dinas	
Beban Penyisihan Piutang Iuran Pelaksanaan Pendidikan	
Jumlah (3)	
JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG (1+2+3)	

c. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sehingga pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya, misalnya defisit penghapusan non lancar.

	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
1) Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	<u>(0,00)</u>	<u>(0,00)</u>
d. Surplus (Defisit) LO		
	<u>31 Desember 2020</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
1) Surplus (Defisit) LO	<u>(13.237.824.270,29)</u>	<u>(12.819.810.547,09)</u>

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel 20. Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2020 dan 2021

<i>dalam rupiah</i>			
No	Surplus (defisit)	2020	2021
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	(13.237.824.270,29)	(12.819.810.547,09)
2	Surplus (Defisit) Non Operasi		
3	Pos Luar Biasa		
	Jumlah	(13.237.824.270,29)	(12.819.810.547,09)

1.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
a. Ekuitas Awal	<u>3.694.846.515,26</u>	<u>2.938.365.727,97</u>

Saldo ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp. 3.694.846.515,26 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2021 *audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp. 2.938.365.727,97 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2019 *audited*.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	<u>(13.237.824.270,29)</u>	<u>(12.819.810.547,09)</u>

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2021, sebagai berikut.

Tabel 21. Surplus/Defisit LO
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2021

<i>dalam rupiah</i>			
No	Uraian	2020	2021
1	Pendapatan LO	0	0
2	Beban	13.237.824.270,29	12.819.810.547,09
3	Surplus/Defisit Dari Operasional (1-2)	(13.237.824.270,29)	(12.819.810.547,09)
4	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	0	0
5	Pos Luar Biasa	0	0
6	Surplus/Defisit LO (3+4+5)	(13.237.824.270,29)	(12.819.810.547,09)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Pada Tahun 2020 telah dilakukan koreksi berjalan atas saldo ekuitas Tahun 2019 yang berdampak pada penurunan akuitas sebesar Rp. 0,00. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
d. RK-PPKD	<u>12.481.343.483,00</u>	<u>12.319.486.311,00</u>

RK-PPKD senilai Rp. 12.319.486.311,00 adalah jumlah dari nilai realisasi anggaran yang diserap oleh Satuan Polisi Pamong Praja selama Tahun Anggaran 2021 ditambah/dikurangi dengan mutasi RK-PPKD antar SKPD.

Nilai mutasi RK-PPKD antar SKPD menjadi positif (menambah LRA) apabila aset yang dimutasi keluar lebih kecil dari nilai aset mutasi masuk, jika nilai aset keluar lebih besar dari aset masuk maka nilainya menjadi negatif (mengurangi LRA)

Sebagaimana rincian :

Uraian	2020	2021
Jumlah Realisasi Belanja LRA	12.490.665.083,00	12.305.011.311,00
Mutasi RK-PPKD antar SKPD	(9.321.600,00)	14.475.000,00
RK-PPKD	12.481.343.483,00	12.319.486.311,00

*Mutasi RK-PPKD antar SKPD senilai Rp 14.475.000,00 adalah jumlah nilai aset Handy Talky yang dimutasi ke Bagian RTP.

Sedangkan aset yang dimutasi masuk ke Satpol PP dari Bagian Umum dan BPKD, nilai asetnya sudah tidak ada.

	31 Desember 2020	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
e. Ekuitas Akhir	2.938.365.727,97	2.438.041.491,88

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2020 dan 2021, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya serta RK-PPKD, sebagai berikut.

Tabel 22. Laporan Perubahan Ekuitas

dalam rupiah

No	Keterangan	2020	2021
1	Ekuitas Awal	3.694.846.515,26	2.938.365.727,97
2	Surplus (defisit) LO	(13.237.824.270,29)	(12.819.810.547,09)
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar		
4	RK-PPKD	12.481.343.483,00	12.319.486.311,00
5	Ekuitas Akhir	2.938.365.727,97	2.438.041.491,88

IV. INFORMASI NON KEUANGAN

1.1 GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG

1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Landasan hukum yang mendukung keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja baik pembentukan maupun operasionalnya adalah :

- A. Landasan Idiil
 - Pancasila
- B. Landasan Konstitusional
 - UUD 1945
- C. Landasan Konstruktural
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 148 dan 149
- D. Landasan Operasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang
 - Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

2. SEJARAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG

Adapun sejarah berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berdiri pada tahun 1992 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1992 dari Pemerintah Kepala Daerah Kabupaten Lumajang, kantor pertama beralamatkan di Jalan Alun-alun Utara No. 7 Lumajang dan pada waktu itu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Bagian Ketertiban. Namun pada tahun 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Setelah itu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memiliki kantor sendiri yang beralamatkan di Jalan Jendral Hariyono No.160 Lumajang sampai sekarang. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berubah namanya menjadi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

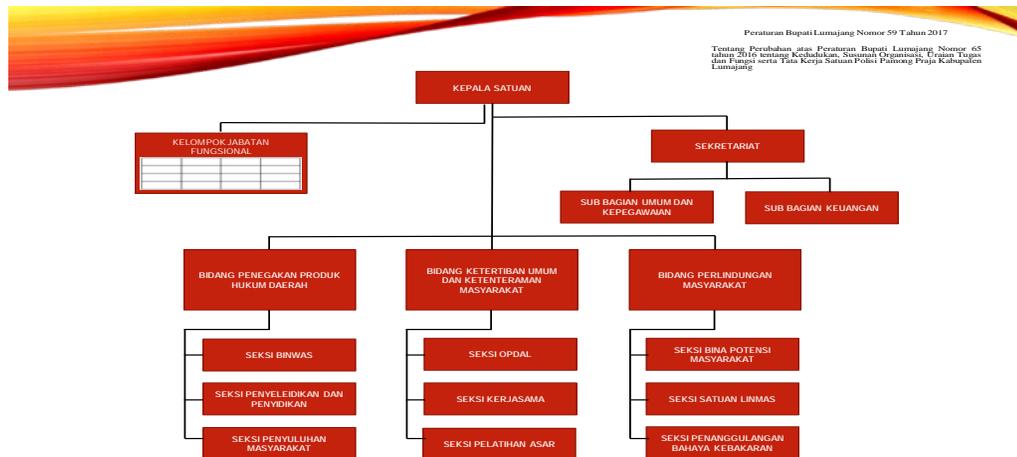
Adapun yang pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Drs. Onto Warsono (Tahun 1993-1997)
2. Drs. Murdiman. M.Si (Tahun 1997-1999)
3. Drs. Budi Santoso, M.Si (Tahun 1999-2001)
4. Drs. Haritomo, SH (Tahun 2001-2002)
5. Drs. Abdul Kahar. M.Si (Tahun 2002-2007)
6. Rochani, S.sos (Tahun 2007-2008)
7. Drs. Rasmin (Plt.) (Tahun 2008)
8. KasihPratondo,SH. (Tahun 2009-2010)
9. SidikPurnomo, SH (Plt.) (Tahun2010)
10. Marantha Subihat (Plt.) (Tahun2010 - 2011)
11. Drs. Rasmin (Tahun 2011 - 2012)
12. Totok Suharto, SH (Tahun 2012 - 26 Oktober 2015)
13. Drs. Basuni (26 Oktober 2015 - 10 Juli 2019)
14. Erik Kurniawan Satrio Andy Putro S. STP (Plt.) (10 Juli 2019 – 2 Januari 2020)

15. Drs. Matali Bilogo, S. Sos (2 Januari 2020 – Sekarang)

3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati No 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, bagan struktur organisasinya adalah :



Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan tahun 2021 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - b) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - c) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja
 - d) Kewajiban-kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - e) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal neraca.
 - f) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
 - g) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
 - h) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - i) Laporan keuangan pokok Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021 terdiri:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 31 Desember 2021.
 - (5) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas empat laporan keuangan.

Lumajang, 31 Desember 2021
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Drs. Matali Bilogo, S. Sos
NIP. 19650508 198603 1 016